

# Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Keutuhan ASEAN Sebagai Lembaga Kerja Sama Regional\*

*Ikran Nusa Bhakti*

*Krisis yang kini melanda beberapa negara di Asia Timur, khususnya ASEAN, tentu berdampak negatif terhadap intensitas kerja sama ASEAN. Beberapa persoalan baru yang muncul sehubungan dengan krisis tersebut dapat menjadi tantangan berat dalam mempertahankan keterpaduan dan solidaritas ASEAN. Akan tetapi, hal itu bukan berarti kiamat bagi forum kerja sama regional ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN dapat mencari "peluang-peluang baru" guna mendinamisasi kerja sama di antara mereka, di samping sebagai sarana perekat guna menjaga keutuhan ASEAN. Langkah beberapa negara anggota ASEAN untuk mengubah cara pandangnya mengenai prinsip-prinsip yang mendasari kerja sama ASEAN pun sudah tepat. Hanya saja, negara-negara ASEAN juga perlu mengubah fokus mereka tentang "keamanan", yakni bukan lagi menonjolkan aspek "keamanan nasional" dan/atau "keamanan regional", melainkan lebih kepada "keamanan manusia". Melalui langkah itu, niscaya ASEAN akan menemukan kembali momentumnya dan diperhitungkan sebagai asosiasi kerja sama regional yang terpadu.*

## Pendahuluan

**K**RISIS ekonomi di Asia Timur yang bermula dari krisis mata uang dan finansial Thailand pada Juli 1997 dan menyebar ke Indonesia, Filipina, Malaysia, Korea Selatan, dan Hongkong, memberi dampak yang sangat besar bagi stabilitas keamanan domestik masing-masing negara dan kawasan. Hanya dalam kurun waktu 8 bulan, Juli 1997 sampai dengan Februari 1998, mata uang negara-ne-

gara ASEAN turun secara drastis. Mata uang baht Thailand terdepresiasi sebesar 45 persen terhadap mata uang dolar AS, rupiah Indonesia 75 persen, ringgit Malaysia 33 persen, peso Filipina 35 persen, dan dolar Singapura 14 persen, sedangkan mata uang dua negara Asia Timur Laut Korea Selatan dan Taiwan masing-masing terdepresiasi sebesar 47 persen dan 15 persen (Ichikawa, 1998).

Apa yang terjadi di Thailand dan beberapa negara ASEAN lainnya, ditambah dengan Korea Selatan, menunjukkan betapa lemahnya sistem ekonomi dan keuangan negara-negara tersebut yang sangat tergantung pada modal asing untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, melalui ekonomi yang berorientasi ekspor

\*Makalah disampaikan pada Forum Dialog V Tentang Politik dan Keamanan Regional dalam Era Pasca Perang Dingin dengan tema "Dampak Krisis Ekonomi Bagi Stabilitas dan Keamanan Kawasan Asia Tenggara", diselenggarakan oleh Badan Litbang Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Bandung, 27-28 Agustus 1998.

dan ditopang oleh "uang panas" (modal asing jangka pendek yang secara cepat dapat terbang kembali ke luar negeri).

Krisis ekonomi dan keuangan tersebut bukan saja berdampak negatif pada keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan negara (*state security*), keamanan nasional (*national security*), keamanan masyarakat (*societal security*) di dalam negara, tetapi juga pada keamanan regional (*regional security*), stabilitas regional dan kerja sama keamanan regional (*regional security cooperation*). Namun demikian, krisis ekonomi tersebut juga membawa dampak positif, baik bagi negara-negara yang terkena krisis maupun bagi negara-negara lain, dalam bentuk mencari "peluang-peluang baru". Dengan kata lain, krisis ekonomi bukan berarti kiamat bagi negara-negara Asia Tenggara. Krisis ekonomi bukan pula berarti berakhirnya kerja sama regional di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam wadah ASEAN. Meski dilanda krisis ekonomi, jumlah negara-negara Asia Tenggara yang bergabung di dalam ASEAN tetap bertambah, dari lima negara pada saat berdirinya ASEAN tanggal 8 Agustus 1967 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand), menjadi enam negara pada 1984 (ditambah Brunei Darussalam), tujuh negara pada 1995 (ditambah Vietnam) dan sembilan negara pada Agustus 1997 (ditambah Laos dan Myanmar).

Berbagai alternatif kebijakan dapat ditemukan untuk menjaga keutuhan atau bahkan mendinamisasikan ASEAN. Adalah suatu kenyataan bahwa krisis ekonomi membuat kerja sama ASEAN menjadi terganggu. Sebagai contoh, jika sebelum krisis ekonomi negara-negara ASEAN melakukan per-

temuan sedikitnya 200 kali dalam setahun, maka setelah krisis hal itu sulit untuk dipenuhi. Contoh lainnya adalah dalam hal kerja sama pertahanan, bilateral ataupun trilateral. Adanya krisis ekonomi tentunya akan mengurangi jumlah latihan militer bersama antara dua atau tiga negara ASEAN. Krisis ekonomi juga berpengaruh besar terhadap bentuk-bentuk kerja sama ASEAN lainnya, baik kerja sama sosial-budaya maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan, krisis ekonomi dapat pula menjadi batu ujian bagi ASEAN dalam mempertahankan solidaritas di antara anggotanya, yaitu saling bantu antara negara-negara yang kurang terkena krisis terhadap negara-negara yang mengalami krisis amat parah.

### Krisis yang Menimbulkan Peluang

Di tengah krisis ekonomi yang masih berlangsung, negara-negara di kawasan Asia Tenggara berupaya mencari peluang baru. Dari sisi kebijakan ekonomi, misalnya, muncul pemikiran untuk melaksanakan program alternatif. Paling sedikit ada lima tema alternatif program yang menjadi tema kunci di negara-negara Asia Tenggara (Bello, n.d.).

Pertama, salah satu penyebab utama dari krisis ekonomi yang terjadi saat ini ialah *indiscriminate globalization of financial markets*. Kontrol pemerintah atas arus keluar masuk modal sangat dibutuhkan karena terbukti arus tersebut sangat mendestabilisasi negara-negara/ekonomi yang sedang berkembang. Kontrol negara ini dibutuhkan bukan saja untuk menstabilkan ekonomi, tetapi juga untuk mengelola proses pembangunan ke arah yang lebih sehat, antara lain sebagai cara untuk mencegah masuknya modal-modal yang bersifat spekulatif.

*Kedua*, meskipun investasi asing sungguh-sungguh dibutuhkan, pertumbuhan ekonomi terutama harus dibiayai melalui tabungan dan investasi dalam negeri. Dengan demikian, sistem-sistem pajak progresif perlu lebih ditingkatkan daripada sekadar pajak regresif yang selama ini berlaku di sebagian besar negara Asia Tenggara.

*Ketiga*, meski pasar-pasar ekspor tetap penting, pembangunan harus direorientasikan pada pentingnya pasar domestik sebagai *stimulus* utama pembangunan. Program ini diikuti oleh agenda ekonomi yang berkeadilan sosial, termasuk dalam hal ini reformasi di bidang penguasaan tanah dan aset ekonomi, khususnya di wilayah pinggiran/pedalaman. Reformasi ini bukan saja membawa masyarakat pinggiran ke pasar, tetapi juga memberdayakan mereka secara ekonomi dan politik, dan akan menciptakan kondisi-kondisi bagi stabilitas sosial dan politik.

*Keempat*, meski negara dan swasta tetap penting dalam hal produksi, distribusi dan pertukaran barang dan jasa, namun perlu dicari "cara ketiga" yang berkaitan dengan semakin pentingnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO). Meski tidak dapat dipungkiri bahwa pasar dan negara dapat memainkan peran penting dalam hal alokasi sumber daya, muncul pandangan bahwa mekanisme ekonomi yang fundamental harus melalui pengambilan keputusan yang demokratis oleh masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat, dan gerakan-gerakan rakyat. Tantangannya adalah bagaimana mengoperasionalkan institusi-institusi ekonomi yang demokratis tersebut, agar terjadi sistem *checks and balances* antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Selain keempat tema tersebut, tema lain yang cukup populer di kawasan Asia Tenggara dan bersifat universal adalah *sustainable development*. Model pertumbuhan ekonomi yang cepat dibiayai oleh modal asing telah berdampak negatif pada ekologi. Oleh karena itu, perlu dipikirkan suatu model pembangunan yang bersifat ramah lingkungan.

Dari sisi kebijakan perdagangan antar-negara ASEAN, muncul pula alternatif gagasan untuk meningkatkan perdagangan intra-ASEAN. Gagasan yang paling populer dikemukakan oleh Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, yaitu agar negara-negara ASEAN melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan mata uang regional yang tidak terkait dengan dolar AS. Implementasinya ialah, jika Malaysia membeli barang dari Indonesia, maka Malaysia akan membayarnya dalam rupiah. Sebaliknya jika Indonesia mengimpor barang dari Malaysia, maka akan dibayar dalam ringgit. Satu hal yang tak terpikirkan ialah, bagaimana menentukan kurs rupiah terhadap ringgit, apakah hal itu dapat bebas dari perhitungan melalui dolar AS atau tidak. Tawaran gagasan Mahathir ini bukan saja terhadap Indonesia tetapi juga terhadap negara-negara ASEAN lainnya, seperti Thailand dan Filipina.

**ASEAN Sebagai Stabilisator vs. Dinamisator**

ASEAN yang didirikan pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok, awalnya merupakan wadah kerja sama ekonomi dan sosial budaya antarnegara Asia Tenggara. Secara umum dipercaya bahwa tujuan utama asosiasi ini ialah membangun suatu pe-

rasaan solidaritas regional antartetangga dengan maksud menciptakan perdamaian dan stabilitas regional. Dengan kata lain, pendirian ASEAN terutama didorong oleh motif politik (*political-driven*) (Soesastro, 1996; Irvine, 1982). Meski kerja sama ekonomi merupakan fokus yang ditonjolkan pada Deklarasi Bangkok, kenyataannya motif politik untuk mengembangkan ASEAN sebagai *conflict defuser and peace maker* (Luhulima, 1994) atau sebagai stabilisator kawasan justru lebih menonjol dalam realitas kerja sama ASEAN ketimbang ASEAN sebagai *dinamisator* pertumbuhan ekonomi. Motif tersebut semakin kuat dengan dimunculkannya Deklarasi Kuala Lumpur 27 November 1971 yang melahirkan konsep Asia Tenggara sebagai Zona Damai, Bebas dan Netral (ZOPFAN -- *Zone of Peace, Freedom and Neutrality*), ditandatangani *Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia* (TAC) pada 24 Februari 1976 dan *Singapore Declaration of 1992* yang memberi acuan-ancuan bagi pembentukan *ASEAN Regional Forum* (ARF) pada Agustus 1994 (Bhakti, n.d.).

Kerja sama ekonomi baru mendapatkan acuan sejak *ASEAN Summit Meeting I* (KTT I) di Bali 1976 yang melahirkan *The Declaration of ASEAN Concord* atau Deklarasi Kesepakatan ASEAN pada 24 Februari 1976 disusul oleh Persetujuan mengenai *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) untuk *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) pada KTT IV ASEAN 1992 di Singapura.

Hingga 1992, para pendiri ASEAN berulang kali menyatakan bahwa integrasi ekonomi regional bukanlah tujuan dari pembentukan ASEAN. Pembentukan AFTA sendiri bukanlah ditujukan untuk integrasi eko-

nomi, melainkan hanya sebagai langkah awal ASEAN untuk terjun ke liberalisasi ekonomi internasional. Evolusi kerja sama ekonomi ASEAN dilakukan untuk menjaga kepaduan ASEAN, memperkuat hubungan ekonomi Asia Tenggara dengan dunia luar dan mempersiapkan anggotanya untuk masuk ke dalam liberalisasi perdagangan dan investasi dalam kerangka kerja sama ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) (Elek and Soesastro, 1997). Selain itu, berbagai inisiatif kerja sama ekonomi ASEAN, seperti pembentukan kawasan Segitiga Pertumbuhan Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Growth Triangle*), didasari oleh pemikiran bahwa di satu pihak ASEAN terlalu besar karena terdapatnya perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antarnegara ASEAN, dan di lain pihak ASEAN terlalu kecil untuk melakukan diplomasi ekonomi di tengah ekonomi dunia yang tidak menentu.

Krisis ekonomi yang berlangsung saat ini semakin menimbulkan rasa pesimis di kalangan anggota ASEAN tentang apakah AFTA dapat tercapai pada 2003 dan liberalisasi ekonomi APEC untuk negara-negara berkembang dapat tercapai pada 2020. Batas akhir pembentukan AFTA dan liberalisasi ekonomi APEC tersebut didasari oleh asumsi-asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN akan tetap tinggi dan ditunjang oleh investasi dari dalam dan luar negeri. Namun dengan adanya krisis ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi menjadi negatif, maka menjadi pertanyaan besar apakah pencapaian batas akhir tersebut akan tercapai.

Seperti telah disebutkan di atas, krisis ekonomi menimbulkan peluang-peluang ba-

ru untuk mencari alternatif-alternatif pembangunan ekonomi. Di tengah krisis tersebut, adalah suatu kenyataan bahwa barang-barang dari Indonesia, khususnya produk pertanian dan bahan pangan lainnya, mengalir deras ke beberapa negara ASEAN baik melalui jalur ekspor resmi maupun melalui penyelundupan. Meski di satu pihak hal itu bersifat positif, namun di lain pihak dapat mengganggu keamanan ekonomi Indonesia sendiri dan negara-negara ASEAN lainnya. Di sini konsep-konsep kerja sama ASEAN yang didasari oleh keterbukaan, saling menghormati, saling menguntungkan dan konsensus mendapatkan tantangan baru.

### Konsep Baru Keamanan dan Modifikasi Prinsip Kerja Sama ASEAN

Di dalam ASEAN selama ini berlaku konsep ketahanan nasional dan ketahanan regional yang mirip dengan keamanan komprehensif. Dalam kaitan itu, keamanan mencakup dimensi-dimensi militer, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologi. Kerja sama keamanan dalam ASEAN (*ASEAN Co-operative Security*) selama ini juga ditujukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas regional. Kerja sama tersebut dilakukan baik secara bilateral, trilateral atau bahkan multilateral, seperti dalam forum dialog ASEAN (ARF). Namun akhir-akhir ini muncul berbagai pertanyaan: *Pertama*, siapa yang menjadi objek keamanan, keamanan itu untuk siapa, apakah individu, kelompok, bangsa, negara, kawasan atau dunia? *Kedua*, apa yang menjadi instrumen keamanan atau dengan cara-cara bagaimana keamanan dapat dicapai? Apakah melalui militer, nuklir, politik, diplomatik, ekonomi? *Ketiga*, apa yang menjadi biaya keamanan --

atas biaya apa dari segi ekonomi, sosial dan nilai-nilai politik keamanan dapat dicapai?

Ada beberapa konsep keamanan yang dikenal selama ini. *Pertama*, keamanan militer yang diartikan sebagai mempertahankan warga, wilayah dan sumber daya suatu negara terhadap musuh-musuh luar. "Keamanan politik" mencakup upaya melindungi stabilitas organisasional negara, sistem-sistem pemerintahan, dan ideologi-ideologi yang melegitimasi. "Keamanan ekonomi" mencakup upaya mempertahankan tingkat-tingkat tertentu kemakmuran dan kekuatan negara melalui akses pada sumber daya alam dan manusia, keuangan dan pasar. "Keamanan masyarakat" mencakup upaya mempertahankan pola-pola tradisional atas bahasa, budaya, agama, tata sosial dan identitas komunal dalam konteks perubahan evolusioner. "Keamanan lingkungan" berarti menjaga ekosistem alam. Jika selama ini fokus keamanan adalah keamanan nasional, maka kini berkembang suatu konsep yang memfokuskan pada "keamanan manusia" (*human security*). Keamanan manusia memiliki dua aspek. Secara negatif, keamanan manusia merujuk pada rasa bebas dari ketakutan, kelaparan, penyerangan, kekejaman, pemenjaraan tanpa pengadilan yang adil dan bebas, diskriminasi atas berbagai dasar (agama, etnik, ras) dan sebagainya. Secara positif, keamanan manusia berarti kebebasan untuk mencapai kapasitas dan peluang sehingga setiap manusia dapat menikmati hidupnya pada tingkatan tertinggi tanpa menimbulkan kendala pada manusia lainnya untuk mendapatkan keamanan yang sama. Jika digabungkan, "keamanan manusia" merujuk pada kualitas hidup rakyat di dalam masyarakat atau *polity*. Segala apa yang mengurangi kualitas hidup -- tekanan de-



mografis, pengurangan akses pada sumber daya dan sebagainya -- merupakan ancaman terhadap keamanan (Thakur, n.d.).

Tampaknya sudah saatnya negara-negara ASEAN juga mengubah fokus mereka tentang "keamanan", bukan lagi pada "keamanan nasional" dan/atau "keamanan regional", tetapi lebih menonjolkan aspek "keamanan manusia". Sejalan dengan itu, kerja sama ASEAN di bidang keamanan dalam arti luas, termasuk keamanan militer, keamanan negara, keamanan ekonomi, keamanan politik dan sebagainya lebih ditujukan pada peningkatan kualitas hidup warga negara dari semua negara anggota ASEAN.

Perubahan masa menuju millenium ketiga juga telah mengubah cara pandang beberapa negara ASEAN mengenai prinsip-prinsip yang menjadi dasar kerja sama ASEAN. *Pertama*, prinsip konsensus yang menjadi dasar dari *the ASEAN Way*. Tanpa mengurangi arti penting dari prinsip-prinsip *openness, mutual respect, mutual benefit and shared interests*, tampaknya dalam proses pengambilan keputusan sudah waktunya prinsip konsensus sedikit demi sedikit ditinggalkan dan diganti dengan *voting*. Ini sesuai dengan perkembangan keanggotaan ASEAN yang sudah menjadi sembilan dan akan menjadi 10 negara. Jika prinsip konsensus tetap dipakai, tampaknya akan sulit terjadi dinamisasi dalam kerja sama ASEAN karena sulitnya tercapai konsensus. Selain itu, negara-negara ASEAN, khususnya kelima negara pendiri, dipimpin oleh kepala negara/kepala pemerintahan yang bukan lagi dari *the Founding Fathers*. Oleh karena itu, demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan di ASEAN perlu semakin ditingkatkan.

*Kedua*, prinsip *non-interference* terhadap masalah domestik anggotanya. Prinsip ini sebenarnya mulai ditinggalkan pada 1997 menjelang masuknya Myanmar, Laos dan Kamboja ke dalam ASEAN. Deputi Perdana Menteri Malaysia saat itu mengajukan prinsip *positive engagement*, yang membolehkan negara-negara ASEAN ikut "memberi masukan" kepada rezim militer Myanmar dalam hal penyelesaian masalah politiknya dengan para pendukung Aung San Su Kyi dan kepada Kamboja dalam konflik antara PM I Norodom Ranaridh dan PM II Hun Sen. Pada *ASEAN Ministerial Meeting* ke-31 di Manila, kembali prinsip *non-intervensi* ini ditantang. Thailand, didukung Filipina, mengusulkan kebijakan *flexible engagement* (Shambazy, 1998a dan 1998b). Alasan yang dikemukakan Thailand adalah bahwa masalah domestik anggota ASEAN bukan lagi melulu masalah dalam negeri, tetapi sudah berdampak regional. Sebagai contoh, jika terjadi ketegangan politik di Myanmar, maka akan terjadi arus pengungsi dari Myanmar ke Thailand. Oleh karena itu, Thailand merasa berhak meminta rezim militer Myanmar untuk menahan diri atau berdamai dengan pihak oposisi. Permintaan atau pernyataan diplomatik Thailand itu dapat dikategorikan sebagai *flexible engagement*. Demikian pula dengan masalah kebakaran hutan di Indonesia yang berdampak pada kawasan Asia Tenggara, atau masalah di Aceh yang berdampak pada Malaysia.

Untuk sementara waktu gagasan Indonesia yang didukung oleh Malaysia tentang "Peningkatan Interaksi" atau *enhanced interaction*, yaitu diplomasi melalui dialog terbuka antara dua menteri luar negeri atau kepala pemerintahan tentang suatu kasus domestik di salah satu negara ASEAN, da-

pat menjadi jembatan menuju *flexible engagement*. Penerapan *flexible engagement* sendiri perlu pengaturan yang jelas, misalnya, jangan sampai pernyataan politik PM Thailand mengenai Myanmar dilakukan secara tidak langsung (*Megaphone Diplomacy* melalui media massa). Pernyataan politik tersebut sebaiknya dinyatakan secara langsung, terbuka dan terus terang kepada mitranya dari Myanmar. Dengan demikian, *flexible engagement* ini merupakan penguatan dari *enhanced interaction*.

### Penutup

Krisis ekonomi yang melanda beberapa negara Asia Timur, khususnya negara ASEAN, tentunya memiliki dampak negatif bagi intensitas kerja sama ASEAN. Namun demikian, krisis ini dapat pula menjadi suatu peluang yang baik bagi negara-negara ASEAN untuk mendinamisasi kerja sama ekonomi ASEAN, baik dalam bentuk peningkatan perdagangan dan investasi antar-negara ASEAN, maupun dalam meningkatkan diplomasi ekonomi terhadap negara-negara di luar ASEAN. Selain itu, kerja sama di bidang pengembangan pertanian dan agro-industri dapat pula memainkan peran penting dalam membantu negara-negara ASEAN yang sedang dilanda krisis ekonomi.

Tantangan terberat pertama bagi Indonesia adalah bagaimana mengubah citra dari negara pemersatu ASEAN, menjadi negara yang menjadi beban ASEAN karena krisis ekonomi dan politik yang sedang dialaminya. Pada pertengahan 1960-an, Indonesia pernah dianggap sebagai "sumber" ketidakstabilan politik di Asia Tenggara, dan sejak akhir 1960-an sampai akhir 1997 Indonesia dipandang sebagai *peace maker* di

ASEAN. Kini, tampaknya, Indonesia dipandang sebagai raksasa Asia Tenggara yang sedang lumpuh dan terluka parah, sehingga perlu dibantu oleh negara-negara Barat dan ASEAN agar dapat sembuh dan bangkit kembali.

Tantangan terberat kedua bagi Indonesia khususnya dan negara-negara ASEAN umumnya adalah bagaimana mencegah Singapura *mengail di air keruh*, yaitu dengan menerima pelarian modal/tabungan dari Indonesia ke negara tersebut tanpa memperhatikan prinsip *mutual respect*, *mutual benefit* dan *shared interests* dengan Indonesia. Pelarian modal dan tabungan itu bukanlah bagian dari investasi intra-ASEAN, melainkan benar-benar *capital flight* dari negara yang sedang dilanda krisis ekonomi kepada negara yang lebih makmur. Ini memang bukan kesalahan Singapura. Indonesia juga harus berintrospeksi apakah selama ini telah dapat menjaga "keamanan manusia" warga negaranya, atau, dengan dalih stabilitas dan keamanan nasional, lebih menonjolkan "keamanan rezim penguasa" sehingga "keamanan politik", "keamanan ekonomi" dan "keamanan masyarakat"-nya terancam.

Terlepas dari berbagai kesimpulan di atas, krisis ekonomi ini akan semakin berat dirasakan oleh ASEAN pada 1999-2000, ketika bantuan asing sudah sulit mengalir dan ekonomi regional masih terpuruk. Itu merupakan periode terberat dalam mempertahankan kepaduan dan solidaritas ASEAN. Meski begitu, sulit dipercaya bahwa ASEAN akan bubar, karena setelah fondasi solidaritas dan kepaduannya dibangun di atas runtuhnya konfrontasi, secara lambat tetapi pasti ASEAN akan bergerak ke arah yang positif.

ASEAN perlu waktu untuk mendinamisasi kembali bentuk kerja samanya. Jika dalam lima tahun mendatang badai krisis ekonomi ini berlalu, dan generasi baru pemimpin ASEAN lebih terbuka dan demokratis, ASEAN tampaknya akan menemukan momentumnya kembali untuk tetap berjaya serta diperhitungkan sebagai asosiasi kerja sama regional antarnegara berkembang di Asia Tenggara yang terpadu.

## KEPUSTAKAAN

- Bello, Walden. n.d. "East Asia: On the Eve of the Great Transformation?", *AMPO: Japan Asia Quarterly Review*, Vol. 28, No. 3, hlm. 11-16.
- Bhakti, Ikrar Nusa. n.d. "Forum Regional ASEAN dan Pengaturan Keamanan Regional di Asia Pasifik", *Jurnal Ilmu Politik* No. 16, hlm. 59-72.
- Elek, Andrew and Hadi Soesastro. 1997. *ASEAN, APEC and ASEM: Concentric Circles and "Open Clubs"*, Kuala Lumpur, ISIS Malaysia.
- Ichikawa, Nobuyuki. 1998. "The Financial Crisis in East Asia", *Asia Pacific Review*, Vol. 5, No. 1, Spring/Summer, hlm. 156-157.
- Irvine, Roger. 1982. "The Formative Years of ASEAN: 1967-1975", dalam Alison Broinowski (ed.), *Understanding ASEAN* (London and Basingstoke: Macmillan), hlm. 11-12.
- Luhulima, C.P.F., et. al. 1994. *Seperempat Abad ASEAN* (Jakarta: Proyek Kerja Sama Antar Negara ASEAN Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri RI), hlm. 2.
- Shambazy, Budiarto. 1998a. "Non-Intervensi, 'Flexible Engagement', dan Peningkatan Interaksi", *Kompas*, 26 Juli.
- \_\_\_\_\_. 1998b. "Pemimpin ASEAN Pasca Soeharto, Lee Kuan Yew, dan Mahathir", *Kompas*, 26 Juli.
- Soesastro, Hadi. 1996. "APEC's Contribution to Regional Security: ASEAN and the APEC Processes", dalam Hadi Soesastro and Anthony Bergin (eds.), *The Role of Security and Economic Cooperation Structures in the Asia Pacific Region: Indonesian and Australian Views* (Jakarta-Canberra: CSIS in cooperation with Australian Defence Studies Centre), hlm. 23.
- Thakur, Ramesh. n.d. "From National to Human Security".